

**PENGARUH PENGELOLAAN ANGGARAN DANA OTONOMI
KHUSUS DAN TRANSPARANSI KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS
KEUANGAN DI KABUPATEN NABIRE**

SKRIPSI



Oleh :

YONIUS MIRIP

2110011311021

DOSEN PEMBIMBING :

Dr. Popi Fauziati S.E.M.Si., Ak, CA

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi*

Strata (Satu)

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2025

JUDUL SKRIPSI

PENGARUH PENGELOLAAN ANGGARAN DANA OTONOMO KHUSUS
DAN TRANSPARANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DI KABUPATEN NABIRE

Oleh:

Nama: Yonius Mirip

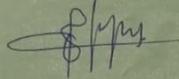
NPM: 2110011311021

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 19 September 2025

Menyetujui

Pembimbing



(Dr. Popi Fauziati S.E., M.Si., AK.CA)

Ketua Program Studi



(Neva Novianti, S.E., M.Acc)

LEMBAR PENGESAHAN
PENGARUH PENGELOLAAN ANGGARAN DANA OTONOMO KHUSUS
DAN TRANSPARANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DI KABUPATEN NABIRE

Oleh:

Nama: Yonius Mirip

NPM: 2110011311021

Tim Penguji

Ketua

(Dr. Popi Fauziati S.E., M.Si., AK.CA)

Sekretaris

(Dr. Yunitma S.E., M.Si., AK., CA)

Anggota

(Siti Rahmi, SE., M.ACC., CA)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Pada tanggal 19 Septemeber 2025

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bung Hatta



(Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan transparansi kinerja instansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas keuangan di Kabupaten Nabire. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling pada instansi pemerintah daerah yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Otsus yaitu Bappeda Kabupaten Nabire. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda menggunakan software EViews.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pengelolaan anggaran Dana Otsus berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan (sig. 0,044 < 0,05). Sementara itu, transparansi kinerja instansi pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan (sig. 0,521 > 0,05). Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,189 menunjukkan bahwa hanya 18,9% variasi akuntabilitas keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya peningkatan efektivitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus sebagai instrumen fiskal strategis dalam pembangunan daerah. Selain itu, transparansi kinerja perlu diikuti dengan sistem pengawasan dan implementasi yang lebih kuat agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Otonomi Khusus, Transparansi Kinerja, Akuntabilitas Keuangan, Pemerintah Daerah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Pengaruh Pengelolaan Anggaran Dana Otonomi Khusus Dan Transparansi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas keuangan Di Kabupatn Nabire*. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan rasa terima kasih yang mendalam, penulis ingin menyampaikan penghargaan kepada:

1. **Allah SWT** yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. **Orang tua tercinta**, yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan baik secara moral maupun materiil.
3. **Bapak/Ibu [.....]**, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta kritik dan saran yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
4. **Bapak/Ibu Ketua dan Sekretaris Program Studi [.....]**, yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam penyelesaian penelitian ini.

5. **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis**, yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan.
6. **Teman-teman seperjuangan**, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. **Seluruh pihak** yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah membantu dan mendukung penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat menjadi kontribusi ilmiah yang bermanfaat dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yonius Mirip

Npm : 2110011311021

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, 15 September 2025

Agung Pratama Suhendra
2110011311046

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemerintah daerah memiliki peranan strategis dalam mengelola keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Di Papua, salah satu sumber dana utama yang menunjang pembangunan adalah Dana Otonomi Khusus (Otsus), yang diberikan sebagai bentuk afirmasi dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Kabupaten Nabire, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah, juga menerima alokasi dana ini dengan tujuan mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan anggaran Dana Otonomi Khusus di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Nabire, masih menghadapi sejumlah tantangan. Permasalahan seperti rendahnya transparansi, lemahnya pengawasan internal, dan kurangnya akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sering kali menjadi sorotan publik (Rantepulung, O., Mollet, J. A., & Ratang, W. 2023).

Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran, khususnya dana Otsus, perlu dianalisis secara mendalam untuk memastikan bahwa dana yang besar tersebut benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab. Serta efektivitas penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) sangat bergantung pada

kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi anggaran tersebut secara transparan dan akuntabel.

Menurut (Tatogo, Layuk, & Bharanti, 2018) menyatakan bahwa dalam konteks Kabupaten Nabire, penting untuk memastikan bahwa alokasi dana Otsus diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan, pengawasan yang ketat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan dari dana Otsus

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan elemen masyarakat sipil diperlukan guna menciptakan sistem tata kelola keuangan daerah yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan demikian, Dana Otsus tidak hanya menjadi instrumen fiskal semata, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat integrasi sosial dan politik di wilayah Papua, khususnya di Kabupaten Nabire.

Tabel 1. Alokasi Dana Otonomi Khusus tahun 2021-2024
Di Kabupaten Nabire

KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH		
NO	TAHUN	TOTAL ANGGARAN
1	2021	45.756.973.242
2	2022	136.000.000.000
3	2023	140.000.000.000
4	2024	181.000.000.000

Sumber : www.Nabire.net 2024

Pada periode 2021 hingga 2024, Kabupaten Nabire yang merupakan bagian dari Provinsi Papua Tengah menerima alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dengan tren yang meningkat signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, anggaran Dana Otsus yang diterima sebesar Rp45.756.973.242. Jumlah ini mencerminkan masa transisi menuju kebijakan baru pengelolaan dana Otsus berdasarkan perubahan regulasi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Memasuki tahun 2022, alokasi Dana Otsus melonjak tajam menjadi Rp136.000.000.000, yang menunjukkan mulai diterapkannya sistem penyaluran dana dalam bentuk block grant dan specific grant, sesuai dengan amanat peraturan baru. Kenaikan ini juga mencerminkan fokus pembangunan pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat adat Papua (OAP).

Pada tahun 2023, dana yang dialokasikan kembali meningkat menjadi Rp140.000.000.000. Anggaran ini terus diarahkan untuk mendukung sektor-sektor prioritas, termasuk infrastruktur dasar dan ekonomi kerakyatan, sebagai bagian dari komitmen untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Puncaknya terjadi pada tahun 2024, di mana Kabupaten Nabire menerima Dana Otsus sebesar Rp181.000.000.000—jumlah tertinggi dalam empat tahun terakhir. Kenaikan ini menunjukkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat untuk pembangunan di Papua Tengah, khususnya dalam memperkuat program afirmatif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat asli Papua di Kabupaten Nabire.

Secara keseluruhan, total anggaran Dana Otsus yang diterima Kabupaten Nabire selama empat tahun mencapai lebih dari Rp500 miliar, yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap percepatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Adapun Penelitian terdahulu oleh Djabu (2023) mengkaji implementasi otonomi khusus di Kabupaten Nabire, dengan fokus pada pengelolaan keuangan daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat alokasi dana yang signifikan, implementasi masih menghadapi tantangan seperti koordinasi antarlembaga, pemahaman yang belum merata terkait konsep otonomi khusus, dan keterbatasan sumber daya manusia. Langkah-langkah seperti peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kerjasama antarlembaga telah diambil untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Sementara laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Nabire Tahun Anggaran 2023 menyajikan informasi kinerja atas penyelenggaraan kebijakan pembangunan daerah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp127,66 miliar (171,51% dari target), dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1,34 triliun (97,82% dari target). Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) juga tercatat dalam pendapatan transfer, menunjukkan peran penting dana tersebut dalam pembangunan daerah.

Nabire.Netpapuaposnabire.com

Dalam perancangan pembicaraan bupati kabupaten nabire diatas ada Penelitian oleh Beatrix Selpiana Rumere dan rekan-rekannya (2023) menganalisis pengaruh perencanaan, evaluasi, dan pelaporan terhadap kualitas kinerja keuangan di BAPPEDA Nabire. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas kinerja keuangan, sementara evaluasi dan pelaporan berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menekankan pentingnya evaluasi sistematis dan pelaporan yang transparan dalam meningkatkan efisiensi keuangan dan akuntabilitas publik. [OJS-UKI Paulus](#)

Maka keseriusan penting dalam pengelolaan anggaran dana otonomi khusus yaitu transparansi kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan akuntabilitas keuangan yang baik. Pemerintah yang transparan akan memberikan akses informasi yang memadai kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana publik, termasuk Dana Otonomi Khusus. Di sisi lain, akuntabilitas keuangan daerah merupakan cerminan dari

seberapa baik pemerintah daerah melaksanakan tanggung jawab keuangannya secara terbuka dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas keuangan daerah adalah aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Selain memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan dengan transparan, akuntabilitas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu memberikan laporan keuangan yang jelas, rinci, dan dapat diakses oleh masyarakat, serta tunduk pada proses audit yang independen untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dana.

Pentingnya akuntabilitas keuangan daerah juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif untuk program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Prinsip ini sejalan dengan konsep "Good Governance," yang menekankan transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam seluruh aspek pemerintahan. Pemerintah daerah yang dapat mempertahankan akuntabilitas keuangan dengan baik berpotensi menarik investasi dan membangun reputasi positif di tingkat lokal maupun nasional. Dalam konteks ini, dua aspek penting yaitu **pengelolaan anggaran dana Otsus** dan **transparansi kinerja instansi pemerintah daerah** menjadi faktor-faktor krusial yang diduga berpengaruh terhadap **tingkat akuntabilitas keuangan** di lingkungan pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kedua variabel tersebut mempengaruhi akuntabilitas keuangan di Kabupaten Nabire.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian adalah menguji secara empiris :

1. Apakah pengelolaan anggaran Dana Otonomi Khusus berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan di Kabupaten Nabire?
2. Apakah transparansi kinerja instansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan di Kabupaten Nabire?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan anggaran Dana Otonomi Khusus terhadap akuntabilitas keuangan di Kabupaten Nabire.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi kinerja instansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas keuangan di Kabupaten Nabire.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini dapat bermanfaat bagi adalah :

- 1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik. Ilmu akuntansi sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dari akuntansi sektor privat, karena berkaitan erat dengan pengelolaan dana publik yang harus memenuhi prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan daerah, terutama yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus), menjadi fokus penting karena menyangkut pemenuhan hak-hak dasar masyarakat serta upaya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi.

2 Manfaat praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang signifikan, terutama bagi pemerintah daerah Kabupaten Nabire. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Sebagaimana diketahui, dana Otsus merupakan instrumen fiskal yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat asli Papua. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan dana ini sangat menentukan capaian pembangunan daerah, baik dari sisi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi kerakyatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam upaya membantu penulis dalam menyusun penelitian ini, peneliti telah secara terstruktur mengorganisir skripsi ini ke dalam lima bab yang masing-masing babnya menguraikan konten dari sub-bab yang dijelaskan secara rinci dan terstruktur dengan jelas. Adapun tata cara penulisan yang digunakan meliputi:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini mencakup beberapa sub-bab yang terdiri dari latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, dan struktur penulisan.

2. BAB II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini mencakup beberapa sub-bab yang terkait dengan kerangka teoritis dari penelitian ini, pembentukan hipotesis, dan kerangka berpikir yang berguna untuk mengarahkan penelitian ini.

3. BAB III ini Bagian ketiga dari penelitian ini membahas topik yang meliputi informasi tentang kelompok populasi dan teknik pengambilan sampel, metode penelitian yang diterapkan, sumber data dan cara pengumpulan informasi, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta strategi analisis data yang digunakan.

4. BAB IV Bab ini menyajikan uraian hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data di lapangan. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Selain itu, dalam bab ini juga dibahas hasil temuan penelitian dengan mengaitkannya pada teori yang relevan

dan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga dapat diperoleh interpretasi dan pemahaman yang lebih mendalam.

- 5 BAB V Bab ini berisi rangkuman penelitian dalam bentuk kesimpulan yang menjawab rumusan masalah, serta saran yang ditujukan baik kepada pihak praktis maupun akademis. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, sedangkan saran diberikan sebagai masukan yang berguna bagi penelitian selanjutnya maupun bagi pihak terkait.